



Retribusi Parkir Diusulkan Dibayar Bareng Pajak

WATES—DPRD Kulonprogo mengusulkan pembayaran retribusi parkir dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan. Kebijakan ini bisa diterapkan sebagai upaya mengantisipasi kebocoran sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.

Triyo Handoko
triyoharianjogja.com

Usulan ini bertujuan agar penarikan retribusi lebih efektif dan besaran yang diterima untuk PAD lebih jelas.

Pada 2024, retribusi parkir yang diperoleh mencapai Rp600 juta.

Usulan itu disampaikan Dewan kepada jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kulonprogo dalam rapat koordinasi, Kamis (6/2).

Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, sebelumnya menjelaskan ada banyak kebocoran dalam penerimaan retribusi dan pajak, sehingga PAD di Bumi Binangun sangat kecil. Untuk mengatasi kebocoran, perlu inovasi kebijakan.

Aris menyebut usulan retribusi parkir dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan tiap tahun supaya penarikan retribusi efektif dan besaran yang diterima untuk PAD lebih jelas. "Usulan ini juga bisa diterapkan untuk sektor lain, sehingga penerimaan PAD Kulonprogo lebih optimal," katanya.

Kondisi anggaran yang terbatas imbas adanya Inpres No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, menurut Aris, perlu ditanggapi serius oleh Pemkab Kulonprogo. "Jangan sampai pembangunan yang ada tidak optimal karena terbatasnya anggaran, solusinya bisa dengan meningkatkan PAD," katanya.

Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran Dishub Kulonprogo, Sri Wahyuniarto, siap mempertimbangkan usulan Dewan. Ia menyebut dalam rapat tersebut juga terdapat alternatif lain untuk mengefektifkan dan memaksimalkan potensi retribusi parkir, di antaranya membuka sistem lelang terbuka, menggunakan sistem parkir terpadu khususnya di Alun-Alun Wates; hingga penggunaan teknologi informasi untuk parkir agar pendapatannya maksimal. "Seluruhnya kami pertimbangkan dengan baik, selama ini sistem parkir yang ada masih dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu kelompok masyarakat," katanya.

Total terdapat 87 kelompok pengelola parkir yang tersebar di seluruh

Kulonprogo. Selama ini, menurut Wahyu, target PAD dari sektor perparkiran selalu tercapai. Pada 2024, retribusi parkir yang diperoleh mencapai Rp600 juta, sebelumnya pada 2023 memperoleh Rp350 juta, sedangkan tahun ini PAD sektor perparkiran ditargetkan Rp690 juta.

Perolehan ini sudah sesuai target meskipun pada 2024 ada kenaikan PAD hampir dua kali lipat. "Sebenarnya tidak ada kebocoran, kalau potensi yang ada belum termaksimalkan dengan baik, artinya mestinya nilai PAD lebih dari itu," katanya.

Rapat koordinasi antara Dishub dan DPRD Kulonprogo, menurut Wahyu, bertujuan untuk mengevaluasi parkir agar lebih banyak menyumbang ke PAD, dan belum pada rencana revisi Perda No.1/2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Selain mempertimbangkan PAD, dalam mengevaluasi perparkiran Dishub juga memperhatikan faktor lain seperti lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, hingga kondisi sosial para pengelola parkir. "Agar semuanya dapat menerima manajemen parkir dengan baik," katanya.